

37 WNI Dievakuasi dari Suriah
Erabaru.net
February 16, 2012
By Era Baru News

Jakarta – Sebanyak 37 WNI dari Suriah dievakuasi oleh KBRI Suriah ke Indonesia. Mereka telah diberangkatkan dari Damaskus, Suriah Rabu kemarin (15/2) dan akan tiba di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Banten hari ini, Kamis (16/2) pukul 15.45 WIB.

“Proses evakuasi 37 WNI dari Suriah oleh Kementerian Luar Negeri dan Satgas KBRI Damaskus merupakan bagian dari evakuasi WNI secara bertahap dan khususnya bagi para WNI yang berada di wilayah konflik,” demikian ditulis Kementerian Luar Negeri dari siaran pers Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri, Kamis (16/2).

Mereka tersebut terdiri dari 19 mahasiswa beserta keluarganya, 17 TKI Penata Laksana Rumah tangga (PLRT) dan 1 anak dari TKI. Para TKI akan diserahkan dari Kemlu kepada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) di TKI Lounge Bandara Soekarno Hatta.

Selanjutnya rombongan PLRT akan difasilitasi kepulangannya ke daerah asal masing-masing. Sementara 19 mahasiswa beserta keluarganya yang tidak dijemput oleh pihak keluarga, akan difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing oleh Kemlu.

Proses evakuasi yang telah dilakukan tersebut diantaranya merupakan 6 WNI PLRT yang bekerja di wilayah konflik di Suriah, yaitu 2 TKI PLRT dari Homs dan 4 TKI PLRT dari Damascus Countryside.

Menurut Kemenlu, proses evakuasi terhadap 37 WNI dari Suriah oleh Kementerian Luar Negeri dan Satgas KBRI Damaskus, merupakan bagian dari evakuasi WNI secara bertahap dan khususnya bagi para WNI yang berada di wilayah konflik.

Hingga saat ini sebanyak 98 TKI PLRT masih berada di penampungan sementara KBRI Damaskus. Pemerintah sedang mengupayakan mereka segera dievakuasi ke Indonesia. Termasuk pembayaran kompensasi terhadap PLRT yang belum menyesuaikan kontraknya.

“Segera mendapatkan exit permit, termasuk pembayaran kompensasi terhadap majikan karena kontraknya belum selesai,” ungkap Kemenlu.

Sebelumnya, resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB untuk menghentikan aksi kekerasan di Suriah gagal disahkan setelah diveto China dan Rusia. Pemerintah Indonesia dalam hal ini mendesak dihentikannya tindak kekerasan kepada rakyat sipil dan mendorong digulirkannya proses politik di Suriah. (mas/asr)